



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JAKA SUCIPTA**
2. Jabatan : **KEPALA SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SEKTOR PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN**
3. NHK : **132699**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.120.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/55 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
4. Bangunan Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Bangunan Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 663.000.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	86.835.200
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	720.936.620
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.590.771.820
III. HUTANG	Rp.	200.526.529
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.390.245.291

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.